

Etika Komunikasi Digital

Perspektif Habermas, Foucault, dan Scheler dalam Konteks Indonesia

Slamet Subekti

ABSTRAK: Revolusi digital membawa dampak ganda bagi ruang publik Indonesia: membuka potensi demokratis sekaligus memunculkan patologi kompleks seperti hoaks, polarisasi, dan ujaran kebencian. Artikel ini berargumen bahwa pendekatan etika parsial tidak memadai untuk merespons dinamika tersebut. Dengan metode triangulasi teoritis, analisis ini mengintegrasikan perspektif Jürgen Habermas, Michel Foucault, dan Max Scheler untuk menawarkan kerangka holistik. Habermas menyediakan landasan normatif-prosedural tentang ruang publik ideal dan distorsi komunikasi. Foucault membongkar relasi kuasa/ pengetahuan serta mekanisme disipliner dalam arsitektur digital. Sementara Scheler melengkapi dengan fondasi aksiologis melalui etika nilai material dan kritik terhadap *resentimen*. Studi kasus kontekstual Indonesia menunjukkan bahwa ketiga perspektif saling melengkapi secara dialektis. Disimpulkan bahwa etika komunikasi digital yang efektif memerlukan integrasi tiga lapis: (1) penguatan prosedur deliberatif-rasional (Habermas); (2) kewaspadaan kritis terhadap kuasa (Foucault); dan (3) pembangunan karakter berbasis nilai dan pendidikan perasaan (Scheler). Sintesis ini diharapkan dapat mengarahkan ekosistem digital Indonesia menjadi ruang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga adil dan manusiawi.

KATA KUNCI: Etika Komunikasi Digital, Ruang Publik, Kuasa, Nilai, Indonesia.

ABSTRACT: *The digital revolution presents a dual impact on Indonesia's public sphere: unlocking democratic potential while simultaneously giving rise to complex pathologies such as hoaxes, polarization, and hate speech. This article argues that a partial ethical approach is inadequate to address these dynamics. Utilizing theoretical triangulation, this analysis integrates the perspectives of Jürgen Habermas, Michel Foucault, and Max Scheler to offer a holistic framework. Habermas*

provides the normative-procedural foundation concerning the ideal public sphere and communicative distortions. Foucault deconstructs power/knowledge relations and disciplinary mechanisms within the digital architecture. Meanwhile, Scheler complements this with an axiological foundation through material ethics of value and a critique of resentment. Contextual Indonesian case studies demonstrate that these three perspectives complement each other dialectically. It is concluded that an effective digital communication ethics requires a three-layered integration: (1) strengthening deliberative-rational procedures (Habermas); (2) maintaining critical vigilance towards power (Foucault); and (3) building character based on values and the education of feeling (Scheler). This synthesis is expected to guide Indonesia's digital ecosystem towards becoming a space that is not only intelligent but also just and humane.

KEYWORDS: *Digital Communication Ethics, Public Sphere, Power, Values, Indonesia.*

1. PENDAHULUAN: TRANSFORMASI DIGITAL DAN KRISIS ETIKA KOMUNIKASI DI INDONESIA

Revolusi digital abad ke-21 telah melahirkan sebuah ruang publik baru yang bersifat global, instan, terdesentralisasi, dan selalu terhubung. Ruang ini, di satu sisi, menjanjikan realisasi mimpi Pencerahan tentang demokratisasi pengetahuan, emansipasi partisipasi politik, dan penghapusan hambatan geografis untuk solidaritas. Namun, di sisi lain, ia juga dengan cepat berubah menjadi medan pertempuran yang penuh dengan disinformasi terkoordinasi, polarisasi identitas yang mengeras, ujaran kebencian yang memecah belah, serta erosi nilai-nilai kebajikan dan kepercayaan sosial. Konteks Indonesia, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, tingkat penetrasi media sosial yang sangat tinggi, heterogenitas sosio-kultural yang luar biasa, serta dinamika politik pasca-Reformasi yang cair, menjadi sebuah “laboratorium hidup” yang krusial dan unik untuk menyelidiki dinamika etika komunikasi digital.

Fenomena seperti industri *buzzer* politik, hukum *silence effect* UU ITE, viralnya konten konspirasi, dan kekerasan siber berbasis gender menunjukkan bahwa masalahnya bukan lagi sekadar pada konten individu, tetapi pada struktur, logika, dan ekosistem komunikasi digital itu sendiri. Pendekatan etika konvensional—yang sering kali hanya fokus pada norma individual (misalnya, «jangan menyebarkan hoaks») atau regulasi *top-down*—terbukti tidak memadai. Diperlukan sebuah pendekatan yang mampu mengintegrasikan analisis pada level

makro (struktur sosial-teknologis), meso (praktik kelembagaan dan wacana), dan mikro (pengalaman subjektif dan nilai).

Pertanyaan sentral paper ini adalah: **Bagaimana perspektif filsafat Jürgen Habermas, Michel Foucault, dan Max Scheler memberikan lensa analitis multidimensi yang komprehensif untuk mendiagnosis dan merespons tantangan etika komunikasi digital, khususnya dalam konteks sosio-kultural dan politik Indonesia?**

Ketiga filsuf ini dipilih bukan hanya karena pengaruhnya yang luas, tetapi karena mereka menawarkan tingkat analisis yang berbeda dan saling melengkapi secara dialektis. **Habermas**, mewarisi tradisi teori kritis Frankfurt, memberikan kerangka **normatif-prosedural** tentang bagaimana komunikasi yang bebas, setara, dan rasional seharusnya berlangsung dalam ruang publik demokratis. Konsep *tindakan komunikatif* dan *etika diskursus*-nya menjadi tolok ukur ideal untuk mengidentifikasi patologi seperti distorsi komunikasi dan kolonisasi *lifeworld*. **Foucault**, dengan metode genealogis dan arkeologisnya, membongkar **relasi kuasa** yang produktif dan tersembunyi di balik wacana, pengetahuan, dan praktik yang tampak netral. Analisisnya tentang disiplin, biopolitik, dan teknologi diri mengungkap bagaimana subjektivitas kita dibentuk dan diatur oleh arsitektur digital. Sementara **Scheler**, sebagai fenomenolog, menawarkan fondasi **aksiologis-emosional** yang mendalam. Etika nilai material dan kritiknya terhadap *resentimen* menyoroti dimensi *hati nurani* dan hierarki nilai yang sering diabaikan dalam analisis rasionalistik, menjelaskan mengapa ruang digital bisa menjadi begitu penuh kebencian dan dangkal secara spiritual.

Dengan menyatukan ketiganya, kita dapat melakukan perjalanan analitis yang utuh: dari pertanyaan **“Bagaimana kita harus berkomunikasi secara normatif?”** (Habermas), melompat ke **“Dalam kondisi kuasa dan pengetahuan seperti apakah komunikasi kita mungkin terjadi?”** (Foucault), dan akhirnya menyelam ke **“Nilai-nilai mendasar dan sikap batin apa yang harus mendasari keseluruhan sikap komunikatif kita?”** (Scheler). Paper ini akan diawali dengan eksplorasi mendalam terhadap teori masing-masing filsuf, dilanjutkan dengan penerapannya dalam studi kasus Indonesia yang diperkaya, dan diakhiri dengan sintesis komparatif yang menghasilkan rekomendasi etis yang integratif dan kontekstual.

2. JURGEN HABERMAS: RUANG PUBLIK, RASIONALITAS KOMUNIKATIF DAN DISTORSI DIGITAL

2.1. Teori Tindakan Komunikatif dan Ruang Publik Ideal

Inti proyek filsafat Habermas adalah *Teori Tindakan Komunikatif*. Habermas membedakan secara tegas antara **tindakan instrumental/strategis** (berorientasi pada keberhasilan mencapai tujuan, menggunakan orang lain sebagai sarana) dan **tindakan komunikatif** (berorientasi pada pencapaian pemahaman bersama (*Verständigung*) melalui koordinasi konsensual).¹ Dalam tindakan komunikatif, partisipan secara inherent mengajukan tiga “**klaim kesahihan**” (*validity claims*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara diskursif: **kebenaran** (*truth*) atas proposisi yang dinyatakan, **ketepatan normatif** (*rightness*) sesuai konteks sosial, dan **kejujuran/ketulusan** (*truthfulness*) dari penutur.²

Ruang publik, bagi Habermas, adalah domain kehidupan sosial di mana warga berkumpul sebagai pribadi privat untuk membentuk **opini publik yang rasional** melalui tindakan komunikatif. Ruang publik borjuis historis (seperti salon, kafe) meskipun terbatas, menawarkan model ideal: sebuah arena yang relatif otonom dari negara dan pasar, di mana «**kekuatan argumen yang lebih baik**» (*the force of the better argument*) menjadi satu-satunya otoritas, dan di mana partisipasi terbuka, setara, dan bebas dari koersi.³ Tujuan akhirnya adalah membentuk kekuasaan politik yang legitimate melalui tekanan opini publik yang terbentuk secara rasional.

2.2. Patologi Ruang Publik Digital: Dari Kolonisasi hingga Fragmentasi

Platform media sosial kerap dianggap sebagai ruang publik kontemporer. Namun, analisis Habermasian menunjukkan bahwa ruang ini justru mengalami **patologi dan distorsi struktural** yang dalam:

- **Kolonisasi *Lifeworld* oleh Logika Sistem:** *Lifeworld* (dunia-kehidupan) adalah latar belakang pengetahuan bersama yang menjadi fondasi pemahaman. Dalam masyarakat modern, *lifeworld* terancam «dikolonisasi» oleh sistem ekonomi (logika pasar) dan administratif (logika birokrasi). Platform digital adalah mesin kolonisasi sempurna: logika pasar (perhatian sebagai komoditas, data sebagai bahan mentah) dan logika administratif (algoritma sebagai pengatur) mendominasi interaksi, mereduksi tindakan komunikatif menjadi tindakan strategis untuk *engagement* dan monetisasi.⁴

- **Ekonomi Perhatian dan Erosi Klaim Kesahihan:** Algoritma dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan, yang sering berarti memprioritaskan konten yang emosional, sensasional, konfirmatif, dan polarisasi. Ini menciptakan lingkungan di mana klaim kebenaran dan kejujuran dikalahkan oleh daya tarik (*virality*). Rasionalitas instrumental sistem platform menghancurkan kondisi bagi rasionalitas komunikatif.⁵
- **Fragmentasi *Lifeworld* Digital: Kamar Gema dan Gelembung Filter:** Algoritma personalisasi mengurung pengguna dalam «gelembung filter» (*filter bubbles*) dan memperkuat «kamar gema» (*echo chambers*).⁶ Setiap kelompok mengembangkan *lifeworld* digitalnya sendiri yang homogen dan tertutup, sehingga fondasi pengetahuan bersama yang diperlukan untuk diskursus lintas perbedaan menjadi sirna. Solidaritas sosial terfragmentasi menjadi solidaritas parokial kelompok.
- **Anonimitas dan Pelemahan Akuntabilitas:** Anonimitas parsial di ruang digital melemahkan pertanggungjawaban atas klaim kejujuran (*truthfulness*), memfasilitasi *trolling*, *doxing*, dan *cyberbullying* yang akan sulit terjadi dalam interaksi tatap muka yang memerlukan kehadiran tubuh.

2.3. Aplikasi dalam Konteks Indonesia: Demokrasi Deliberatif di Ujung Tanduk

Analisis Habermasian sangat relevan membaca dua fenomena besar Indonesia kontemporer:

Studi Kasus 1: Pemilu 2024 dan Industrialisasi Tindakan Strategis. Pemilu serentak 2024 menjadi puncak patologi ruang publik digital. Laporan *MAFINDO* dan *LP3ES* menunjukkan eskalasi **disinformasi terkoordinasi** yang dilakukan oleh jaringan *buzzer* dan *bot*. Ruang diskursus tidak diisi oleh perbandingan program (**klaim kebenaran**), tetapi oleh serangan *ad hominem*, isu SARA, dan teori konspirasi.⁷ Ini adalah kemenangan **tindakan strategis** yang bertujuan memenangkan pertarungan opini dengan cara apa pun. **Politik identitas** yang mengeras di media sosial menggerogoti **ketepatan normatif** dasar dari demokrasi deliberatif, yaitu penghormatan pada pihak lain sebagai mitra diskursus yang setara. Debat direduksi menjadi loyalitas primordial, menghambat terbentuknya **solidaritas abstrak** inklusif yang menjadi prasyarat bangsa modern.⁸

Studi Kasus 2: Pandemi COVID-19 dan Perang *Lifeworld* Epistemik. Selama pandemi, terjadi fragmentasi ekstrem *lifeworld* digital berdasarkan

keyakinan kesehatan. Komunitas pro-sains dan anti-vaksin hidup dalam realitas informasi yang sama sekali berbeda, masing-masing diperkuat oleh figur otoritas dan platformnya sendiri (misalnya, Telegram untuk kelompok anti-vaksin).⁹ **Gelembung filter** algoritmik mencegah pertemuan argumen yang saling menguji klaim kebenaran. Hasilnya bukan diskursus, tetapi dua monolog paralel yang saling menganggap pihak lain irasional. Ini menunjukkan kegagalan ruang publik sebagai mediator untuk mencapai **konsensus rasional** tentang pengetahuan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Solusi Etis Habermasian: Institusionalisasi Etika Diskursus Digital. Solusi normatif Habermas adalah memperkuat **etika diskursus** (*Diskursethik*) dan kondisi kelembagaan bagi **rasionalitas komunikatif**. Prinsipnya: “Hanya norma-norma yang dapat menemukan persetujuan semua pihak yang terpengaruh dalam diskursus praktis yang dapat mengklaim sah”.¹⁰ Penerapannya dalam konteks digital Indonesia meliputi:

1. **Literasi Digital Kritis:** Pendidikan yang tidak hanya mampu memverifikasi fakta, tetapi juga memahami prinsip-prinsip dasar argumentasi, pengenalan *fallacy*, dan etika diskursus.
2. **Desain Platform Alternatif:** Mendorong atau mendesain platform yang algoritmanya diarahkan untuk mempromosikan konten berbasis bukti, dialog lintas perbedaan, dan transparansi (misal, *public interest algorithms*).
3. **Penguatan Jurnalisme dan Institusi Verifikasi:** Dukungan struktural pada jurnalisme investigatif dan lembaga *fact-checking* independen seperti *Turnbackhoax* dan *MAFINDO* sebagai penjaga klaim kesahihan di ruang publik.
4. **Reformasi Regulasi:** Merevisi UU ITE dari instrumen represif menjadi instrumen yang melindungi kebebasan berpendapat sebagai prasyarat diskursus, serta mengatur transparansi iklan politik digital.

3. MICHEL FOUCAULT: KUASA/PENGETAHUAN, DISIPLIN DIGITAL, DAN TEKNOLOGI DIRI

3.1. Kuasa Produktif, Wacana, dan Biopolitik

Jika Habermas mencari kondisi ideal bebas-kuasa, Foucault justru menunjukkan bahwa **kuasa** adalah kondisi yang tak terelakkan dari kehidupan sosial. Kuasa bukanlah milik yang dapat diambil, melainkan strategi, hubungan, dan jaringan yang produktif yang mengalir melalui seluruh tubuh sosial.¹¹

Kuasa modern tidak terutama bersifat represif (melarang), tetapi **produktif**—menciptakan pengetahuan, kebenaran, dan bahkan subjek itu sendiri.

Foucault menganalisis bagaimana **wacana** (sistem pernyataan yang menghasilkan objek pengetahuan) diatur oleh aturan-aturan anonim dan menentukan apa yang dapat dipikirkan dan dikatakan pada suatu zaman.¹² Melalui konsep **disiplin**, ia menunjukkan bagaimana institusi (seperti penjara, sekolah, rumah sakit) melalui pengawasan (*surveillance*), normalisasi, dan pemeriksaan (*examination*) menciptakan tubuh yang patuh dan teratur.¹³ Pada era modern, disiplin dilengkapi dengan **biopolitik**—kuasa yang mengelola kehidupan populasi (*population*) sebagai suatu massa biologis, mengatur kelahiran, kematian, kesehatan, dan reproduksi.¹⁴

3.2. Platform Digital sebagai Mesin Kuasa: Panoptikon, Algoritme, dan Subjektivasi

Platform digital adalah mesin kuasa/produksi wacana yang sangat canggih:

- **Panoptikon Digital dan Masyarakat Pengawasan:**
Metafora **Panoptikon** Bentham (menara pengawas sentral yang membuat narapidana mengatur diri karena merasa selalu diawasi) menjadi realitas digital.¹⁵ Pengguna tidak tahu kapan data mereka dipantau oleh algoritma, perusahaan, atau negara. Ketidaktahuan ini menghasilkan **pengaturan diri** (*self-regulation*) yang konstan, menyesuaikan perilaku dengan «norma komunitas» yang ambigu.
- **Algoritme sebagai Mekanisme Normalisasi dan Pemeriksaan:**
Algoritma adalah *engine* **normalisasi**. Mereka menentukan apa yang “trending”, siapa yang “terlihat”, dan konten apa yang “melanggar”. Mereka terus-menerus melakukan **pemeriksaan** (*examination*) terhadap perilaku pengguna, memberi skor (*score*) berupa *engagement rate*, *likes*, *followers*, yang menjadi ukuran nilai sosial digital.¹⁶
- **Biopolitik Data dan Pemerintahan Algorithmic (*Algorithmic Governmentality*):**
Data yang dikumpulkan dari aktivitas digital memungkinkan **biopolitik granular**—pengelolaan populasi bukan sebagai massa homogen, tetapi sebagai kumpulan mikro-kelompok dengan profil psikografis dan perilaku spesifik. Ini memfasilitasi manipulasi yang sangat targeted, baik untuk iklan maupun propaganda politik.¹⁷
- **Subjektivasi Digital: Diri sebagai Proyek Kurasi:**

Platform mendorong **teknologi diri** (*technologies of the self*) yang spesifik: kita diajak untuk terus-menerus mengkurasi dan menampilkan diri (*self-branding*), menginternalisasi logika platform sebagai logika identitas. Diri menjadi “**proyek**” yang harus dikelola untuk mendapat validasi dalam **ekonomi perhatian**.

3.3. Aplikasi dalam Konteks Indonesia: Wacana, Pengawasan, dan Resistensi

Analisis Foucaultian menerangi sisi gelap kuasa digital di Indonesia:

Studi Kasus 3: UU ITE sebagai Dispositif Kuasa dan Efek Membekukan (*Chilling Effect*).

UU ITE Pasal 27-28 sering difungsikan sebagai alat untuk kriminalisasi kritik. Dari sudut pandang Foucault, UU ini bukan hanya alat represif, tetapi bagian dari **dispositif kuasa** yang lebih luas untuk mengelola wacana publik. Ancaman hukum menciptakan **efek membekukan** yang jauh lebih efektif daripada penahanan itu sendiri: warga menjadi mengatur diri sendiri (*self-censorship*), membatasi ruang bicara yang dianggap “berisiko”. Ini adalah kuasa disipliner yang bekerja dengan sempurna, di mana subjek menjadi polisi bagi dirinya sendiri.¹⁸

Studi Kasus 4: Aplikasi PeduliLindungi dan Biopolitik Pandemi.

Peluncuran aplikasi *PeduliLindungi* selama pandemi adalah contoh nyata **biopolitik digital**. Aplikasi ini berfungsi ganda: sebagai teknologi untuk mengelola kesehatan populasi (*biopower*), dan sebagai **panoptikon digital** yang memetakan pergerakan warga. Kuasa tidak hanya terlihat pada kemampuan karantina paksa, tetapi pada disiplin halus yang ditimbulkannya: warga secara sukarela memindai *QR code* di mana-mana, menginternalisasi logika pengawasan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Ini menunjukkan bagaimana **kuasa produktif** bekerja: menciptakan subjek yang patuh melalui teknologi yang dianggap rasional dan untuk kebaikan bersama.¹⁹

Studi Kasus 5: *Cancel Culture* sebagai Pengadilan dan Normalisasi oleh Massa.

Fenomena *cancel culture* atau *pile-on* di media sosial adalah bentuk **normalisasi oleh massa** yang terdesentralisasi. Massa berfungsi sebagai **mekanisme pengawasan panoptik kolektif**, menghukum individu yang dianggap menyimpang dari norma kelompok, seringkali tanpa proses hukum yang adil. Ini adalah bentuk

kuasa yang sangat efektif dalam menegaskan batas-batas wacana yang “dapat diterima” dan mendisiplinkan perilaku ekspresi publik.

Solusi Etis Foucaultian: Kritik Permanen dan Praktik Kebebasan. Etika Foucault bukan tentang norma universal, tetapi tentang **sikap kritis permanen** dan **praktik kebebasan**. Tujuannya adalah “**menolak untuk menjadi seperti apa diri kita**”—menolak penundukkan (*subjection*) oleh kuasa eksternal.²⁰ Dalam konteks digital:

1. **Genealogi dan Kritik Wacana:** Terus-menerus mempertanyakan narasi dominan, melacak asal-usulnya, dan membongkar kepentingan apa yang dilayaninya. Misalnya, mempertanyakan wacana «keamanan nasional» yang digunakan untuk membenarkan pengawasan massal.
2. **Teknologi Diri (*Care of the Self*) Digital:** Mengembangkan praktik otonomi untuk membentuk diri sebagai subjek etis yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh logika platform. Ini bisa berupa *digital detox*, penggunaan teknologi *encryption*, memilih platform alternatif (*fediverse* seperti Mastodon), atau secara sadar melawan logika kurasi diri untuk *likes*.
3. **Membongkar *Black Box Algorithmic*:** Memperjuangkan hak atas penjelasan (*right to explanation*) dan transparansi algoritma sebagai bagian dari resistensi terhadap **normalisasi algorithmic**.
4. **Membentuk Pengetahuan Tandingan (*Counter-Knowledge*):** Mendukung arsip dan wacana alternatif (seperti *Indoprogress*, *Historia*) yang menantang narasi resmi atau dominan.

4. MAX SCHELER: ETIKA NILAI MATERIAL, *RESSENTMENT*, DAN DINGINGGA RUANG DIGITAL

4.1. Etika Nilai Material dan Hierarki Nilai

Max Scheler, dalam *magnum opus*-nya *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values*, melakukan kritik mendasar terhadap etika formal Immanuel Kant.²¹ Bagi Scheler, dasar etika bukanlah bentuk hukum universal yang rasional, melainkan pengalaman intuitif pra-reflektif terhadap **nilai-nilai material (*material values*)**. Nilai-nilai ini bersifat objektif, memiliki hierarki tetap, dan dapat dirasakan melalui **perasaan intentional (*intentionales Fühlen*)**—perasaan yang mengarah pada objek nilai tertentu.

Scheler merumuskan **hierarki nilai** dari yang terendah hingga tertinggi.²²

- **Nilai Kenikmatan (*pleasure values*):** menyenangkan vs. tidak menyenangkan.
- **Nilai Vital (*vital values*):** mulia vs. hina, sehat vs. sakit, kuat vs. lemah.
- **Nilai Spiritual (*spiritual values*):**
 - Nilai Estetis: indah vs. buruk.
 - Nilai Hukum: adil vs. tidak adil.
 - Nilai Epistemik: benar vs. salah.
- **Nilai Suci (*the holy and the unholy*):** nilai religius, yang muncul dalam pengalaman terhadap yang transenden.

Tindakan etis tertinggi adalah **cinta (*Liebe*)**, yang membuka diri untuk mengenali dan mengakui nilai-nilai yang lebih tinggi pada orang lain dan dunia.

4.2. *Ressentiment* sebagai Patologi Sosial dan Pembalikan Nilai

Konsep kunci Scheler adalah ***ressentiment*** (dendam kesumat), suatu proses psikologis-sosiologis yang beracun. *Ressentiment* terjadi ketika hasrat untuk mencapai nilai-nilai tinggi (seperti pengakuan, cinta, keadilan) terhambat oleh ketidakmampuan atau inferioritas yang dirasakan. Akibatnya, timbul dendam terpendam yang akhirnya melampiaskan diri dengan **membalikkan hierarki nilai**.²³ Nilai-nilai yang tidak bisa diraih (misalnya, kebenaran, keadilan) kemudian direndahkan dan dicurigai («kebenaran hanyalah alat penguasa»), sementara nilai-nilai yang lebih rendah (misalnya, kenikmatan melihat orang lain menderita, kekuasaan untuk menghina) diangkat dan dianggap sebagai yang tertinggi. *Ressentiment* adalah sumber moralitas budak (*slave morality*) Nietzsche, yang penuh dengan kebencian dan kepahitan terselubung.

4.3. Aplikasi dalam Konteks Indonesia: Dendam Digital dan Pencarian Makna

Analisis Schelerian memberikan kedalaman psikologis dan spiritual pada fenomena komunikasi digital Indonesia yang sering kali irasional dan penuh kebencian:

Studi Kasus 6: *Buzzer* Politik dan Industrialisasi *Ressentiment*.

Fenomena *buzzer* bayaran bukan sekadar penyebar informasi, tetapi **produsen *ressentiment*** skala industri. Mereka secara sistematis memanipulasi **perasaan intentional** publik dengan memproduksi konten yang merendahkan lawan politik, memupuk kecurigaan, dan menciptakan narasi korban (*victimhood*). Praktik ini melakukan **pembalikan nilai** terstruktur: kesetiaan buta pada kelompok (*fanatisme*) dianggap lebih bernilai (*nilai vital*)

terdistorsi) daripada penilaian objektif terhadap kebenaran dan keadilan (**nilai spiritual**). Kebencian terhadap “musuh” dirayakan sebagai bentuk kesetiaan, sementara dialog yang jujur dicurigai sebagai pengkhianatan.²⁴ Ini menjelaskan mengapa debat politik di media sosial begitu personal, emosional, dan kosong dari substansi nilai spiritual.

Studi Kasus 7: Cyberbullying dan Devaluasi Martabat Manusia.

Kasus *cyberbullying* berat yang dialami aktris Pevita Pearce terkait film *Sri Asih* menunjukkan pendangkalan nilai hingga level paling ekstrem. Pelaku *bullying* mereduksi korban hanya menjadi objek untuk diejek tubuh dan penampilannya (**nilai kenikmatan yang sakit** dari *schadenfreude*), sepenuhnya mengabaikan **nilai kemanusiaan dan martabatnya** sebagai pribadi (**nilai spiritual dan suci**). Ini adalah gejala dari **ketiadaan cinta** (*Liebe*) dan **kerendahan hati** (*Demut*) sebagai sikap dasar dalam relasi—dua hal yang sangat ditekankan Scheler.

Studi Kasus 8: Viralitas Kosong dan Pendangkalan Pengalaman.

Logika *viral* di media sosial cenderung mendorong pertukaran nilai pada level terendah: nilai kenikmatan (konten lucu, *meme* sensasional) dan nilai vital (konten kekerasan, konflik). Konten yang mengandung **nilai spiritual** yang dalam (esai filosofis, analisis kebijakan kompleks, seni yang reflektif) sulit bersaing. Hal ini menyebabkan **pendangkalan kolektif pengalaman nilai** (*value-blindness*). Publik menjadi semakin tidak terlatih untuk merasakan, mengenali, dan menghargai nilai-nilai yang lebih tinggi.

Potensi Kontra: Gelombang Solidaritas Digital. Namun, dalam kasus Pevita Pearce, respons solidaritas luas yang membanjiri media sosial juga menunjukkan potensi ruang digital untuk **pengalaman nilai yang lebih tinggi**. Gerakan dukungan itu adalah ekspresi spontan dari pengakuan terhadap **martabat manusia yang terinjak** (nilai suci) dan solidaritas kemanusiaan (nilai spiritual). Ini adalah kilasan kecil dari «**ordo cinta**» (*ordo amoris*) yang ideal menurut Scheler—di mana cinta sebagai sikap dasar membimbing kita untuk membuka diri terhadap nilai-nilai luhur pada orang lain.²⁵

Solusi Etis Schelerian: Revolusi Hati Nurani dan Pendidikan Perasaan. Solusi Scheler bersifat transformatif dan kultural, berfokus pada pembentukan karakter (*Bildung*):

1. **Pendidikan Nilai dan Perasaan (*Bildung des Herzens*):** Kurikulum pendidikan (formal dan non-formal) harus dirancang untuk melatih kepekaan terhadap hierarki nilai. Bukan mengajarkan nilai sebagai aturan,

tetapi melatih kemampuan untuk **merasakan** keindahan, keadilan, dan kebenaran, serta membedakannya dari kenikmatan semata.

2. **Terapi Sosial terhadap *Ressentiment*:** Mendorong ruang-ruang dialog yang memungkinkan pengakuan (*recognition*) atas keluhan dan perasaan terpinggirkan, sebelum berubah menjadi *ressentiment* yang destruktif. Politik harus diarahkan pada pengakuan, bukan hanya redistribusi.
3. **Mengutamakan Contoh (*Vorbild*) daripada Norma:** Menurut Scheler, kita belajar nilai terutama melalui keteladanan figur yang mencintai nilai-nilai luhur. Mendorong dan menghidupkan figur publik (ulama, intelektual, seniman, influencer) yang komunikasinya menunjukkan penghargaan pada kebenaran, keadilan, dan kerendahan hati.
4. **Membangun Komunitas Digital Berbasis Nilai:** Menciptakan atau bergabung dengan ruang digital (komunitas online, forum) yang secara eksplisit mengedepankan nilai-nilai spiritual dan suci sebagai landasan interaksi, menjadi oase di tengah gurun digital yang gersang.

5. DIALOG ANALISIS KOMPARATIF DAN SINTESIS: MENUJU KERANGKA ETIKA DIGITAL INTEGRATIF UNTUK INDONESIA

Ketiga perspektif filsafat ini, ketika dipadukan, menghasilkan peta diagnostik yang luar biasa kaya dan dialektis untuk memahami krisis etika komunikasi digital Indonesia. Mereka bukan sekadar alternatif, tetapi berada dalam hubungan saling melengkapi dan mengoreksi.

Dialog Kritis antara Paradigma:

1. **Habermas vs. Foucault: Antara Idealisme dan Skeptisisme Kuasa.** Habermas percaya pada kemungkinan mencapai konsensus rasional dalam ruang yang bebas dari koersi (*herrschaftsfreie Kommunikation*). Foucault mencurigai bahwa klaim “rasionalitas” dan “konsensus” itu sendiri bisa menjadi kedok bagi wacana kuasa yang dominan. Sintesisnya: Cita-cita deliberasi Habermasian **harus selalu disertai** dengan kecurigaan kritis Foucaultian. Sebuah debat publik yang tampak rasional tentang, misalnya, UU Cipta Kerja, harus juga ditelusuri: kepentingan ekonomi apa yang membingkai wacana «rasional» tentang efisiensi? Siapa yang tidak didengar dalam konsensus tersebut? Ideal normatif perlu dikawal oleh analisis kuasa.

2. **Habermas/Scheler vs. Foucault: Mengisi Kekosongan Aksiologis dan Motivasi.** Etika diskursus Habermas bisa terjebak dalam formalisme prosedural yang dingin. Di sini, Scheler melengkapi dengan **fondasi aksiologis dan motivasional**. Sebelum seseorang mau terlibat dalam tindakan komunikatif yang ideal (Habermas), ia memerlukan **sikap dasar (*Gesinnung*)** yang menghargai kebenaran dan kejujuran sebagai **nilai-nilai luhur** yang pantas diperjuangkan (Scheler). Tanpa fondasi nilai ini, etika diskursus berisiko menjadi permainan retorika para ahli. Foucault, di sisi lain, mengingatkan bahwa «nilai-nilai luhur» pun bisa menjadi alat normalisasi. Maka, komitmen pada nilai harus disertai praktik kebebasan yang kritis.
3. **Foucault vs. Scheler: Antara Dekonstruksi Subjek dan Rekonstruksi Diri Etis.** Foucault mendekonstruksi subjek sebagai produk kuasa, sementara Scheler (dan fenomenologi umumnya) mempertahankan inti subjektivitas yang mampu mengakses nilai secara intuitif. Titik temu yang produktif terletak pada konsep **teknologi diri**. Praktik kebebasan Foucaultian untuk membentuk diri sebagai subjek etis menemukan **“jiwa” dan arahnya** dalam etika nilai Schelerian. Resistensi terhadap normalisasi algoritmik bukan sekadar untuk memberontak, tetapi harus didasari oleh komitmen pada nilai-nilai luhur seperti keadilan, kebenaran, dan kasih sayang.

Sintesis Tiga Lapis untuk Konteks Indonesia: Sebuah etika komunikasi digital yang holistik dan kontekstual bagi Indonesia haruslah integratif, mencakup tiga lapis analisis dan intervensi:

LAPIS PROSEDURAL-DELIBERATIF (HABERMAS): Membangun Infrastruktur Rasionalitas. Tujuan: Mewujudkan ruang publik digital yang kondusif untuk diskursus rasional dan pembentukan opini publik yang sehat.

Aksi Konkret:

- **Reformasi Regulasi:** Mengubah UU ITE dari alat represi menjadi instrumen yang menjamin kebebasan berekspresi sebagai prasyarat diskursus. Membuat regulasi transparansi iklan dan *sponsored content* politik.
- **Literasi Digital Kritis Nasional:** Program masif yang tidak hanya ajarkan *fact-checking*, tetapi juga logika argumentasi, etika diskursus, dan pemahaman tentang bias kognitif.
- **Dukungan pada Institusi Penjaga Klaim Kesahihan:** Pendanaan dan legitimasi bagi pers independen, lembaga *fact-checking*, dan akademisi untuk berperan sebagai otoritas epistemik yang dipercaya.

- **Desain Platform Berorientasi Publik:** Advokasi untuk *public service algorithms* atau dukungan pada platform alternatif yang mengutamakan konten informatif dan dialog konstruktif.

LAPIS KRITIS-KUASA (FOUCAULT): Membongkar Matriks Kuasa dan Menumbuhkan Otonomi. Tujuan: Meningkatkan kesadaran kritis terhadap mekanisme kuasa di balik platform dan wacana, serta memperkuat kapasitas resistensi dan otonomi digital warga.

Aksi Konkret:

- **Kampanye Kesadaran Algorithmic:** Edukasi publik tentang cara kerja algoritma, *filter bubbles*, dan ekonomi perhatian.
- **Praktik Digital Hygiene dan Teknologi Diri:** Mendorong penggunaan *encryption*, *VPN*, mesin pencari alternatif, *ad-blockers*, dan perilaku *mindful browsing* sebagai bentuk *care of the digital self*.
- **Advokasi untuk Hak Digital:** Memperjuangkan hak atas privasi, hak atas penjelasan algoritma, dan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) dalam kerangka hukum.
- **Dukungan pada Arsip dan Wacana Tandingan:** Memperkuat platform media alternatif, komunitas digital kritis, dan produksi pengetahuan tandingan (*counter-knowledge*) yang menantang narasi dominan.

LAPIS AKSIOLOGIS-KARAKTER (SCHELER): Merevitalisasi Hierarki Nilai dan Pendidikan Hati Nurani. Tujuan: Membentuk karakter bangsa yang memiliki kepekaan nilai, mampu mencintai nilai-nilai luhur, dan bebas dari *resentimen*, sehingga memiliki sikap batin yang tepat sebelum berkomunikasi.

Aksi Konkret:

- **Revitalisasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai:** Mengintegrasikan pendidikan nilai material Schelerian (bukan sekadar norma) ke dalam kurikulum, dengan penekanan pada pengalaman estetis, rasa keadilan, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila secara hidup (misalnya, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai nilai spiritual).
- **Kampanye Empati dan Anti-Kebencian Digital:** Gerakan sosial dan kontra-wacana yang secara aktif mempromosikan empati, kerendahan hati, dan pengakuan martabat manusia di ruang digital, merespons secara kolektif terhadap *cyberbullying* dan ujaran kebencian.
- **Menghidupkan Keteladanan Publik (*Vorbild*):** Mencari dan mendukung figur-figur publik (dari berbagai bidang) yang komunikasi digitalnya

merepresentasikan penghargaan pada kebenaran, kejujuran, dan kasih sayang.

- **Membangun Komunitas Spiritual Digital:** Fasilitasi terbentuknya ruang digital (forum, grup) yang eksplisit berlandaskan nilai-nilai spiritual dan religius yang inklusif, sebagai tempat penguatan dan refleksi.

Ketiga lapis ini harus berjalan simultan dan saling memperkuat. **Rasionalitas tanpa kritisisme terhadap kuasa akan menjadi naif. Kritisisme tanpa fondasi nilai akan menjadi sinis dan destruktif. Fondasi nilai tanpa prosedur rasional akan menjadi dogmatis.** Hanya dengan trilogi ini—komunikasi yang rasional, kritis, dan berhati nurani—ekosistem digital Indonesia dapat ditransformasi menjadi ruang yang benar-benar memanusiakan.

6. KESIMPULAN

Komunikasi digital telah menciptakan medan eksistensial dan sosial baru yang kompleks, yang menuntut respons etis yang cangguh, multi-dimensional, dan kontekstual. Paper ini menunjukkan bahwa dengan merangkai lensa analitis Jürgen Habermas, Michel Foucault, dan Max Scheler, kita memperoleh sebuah perangkat diagnostik dan terapeutik yang sangat komprehensif untuk memahami dan merawat ruang publik digital Indonesia yang sedang sakit.

Habermas mengingatkan kita pada **cita-cita demokrasi deliberatif** yang terdistorsi berat oleh logika pasar perhatian, industri *buzzer* politik, dan fragmentasi *lifeworld* selama pemilu dan pandemi. Impian tentang «kekuatan argumen yang lebih baik» terperangkap dalam gelembung filter dan banjir disinformasi. Foucault memperingatkan kita tentang **jebakan kuasa produktif** yang tersembunyi di balik kenyamanan platform: algoritma sebagai mekanisme normalisasi, aplikasi pelacakan sebagai biopolitik, dan UU ITE sebagai pencipta *chilling effect*. Kita adalah subjek yang sekaligus dibentuk dan diawasi oleh arsitektur digital. Scheler menuntun kita kembali ke **dasar terdalam etika: hati nurani dan hierarki nilai**. Ia menjelaskan mengapa ruang digital bisa dipenuhi *resentimen* dan kebencian yang terindustrialisasi, sekaligus menunjukkan secercah harapan melalui solidaritas digital spontan yang didasari oleh pengakuan akan martabat manusia.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, dinamis, dan penuh paradoks, ketiga perspektif ini bukanlah pilihan yang bisa dipilah-pilih, melainkan **seperangkat kebutuhan yang saling menguatkan**. Tanpa rasionalitas dan prosedur deliberatif

ala Habermas, ruang digital Indonesia akan tetap menjadi rimba yang dikuasai oleh perang narasi *buzzer* dan hoaks. Tanpa kecurigaan dan analisis kuasa ala Foucault, kita akan menjadi budak yang patuh dan riang dari algoritma serta wacana yang dikendalikan oleh negara dan korporasi global. Dan tanpa cinta serta pendidikan perasaan ala Scheler, semua komunikasi kita, betapapun rasional dan kritisnya, akan kehilangan jiwa, empati, dan kemanusiaannya—menjadi dingin, sinis, dan akhirnya, membosankan.

Masa depan etika komunikasi digital Indonesia yang bertanggung jawab dan bermartabat terletak pada **integrasi kreatif dan praksis dari ketiganya**: sebuah visi tentang **komunikasi yang rasional (Habermas), komunikasi yang sadar dan otonom terhadap kuasa (Foucault), dan komunikasi yang berlandaskan hati nurani yang penuh cinta (Scheler)**. Hanya dengan sintesis demikian, transformasi digital dapat benar-benar membawa Indonesia menuju masyarakat informasi yang tidak hanya cerdas dan terkoneksi, tetapi juga adil, beradab, dan manusiawi.

CATATAN KAKI

- 1 Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society* (Beacon Press, 1984).
- 2 Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Volume 1* (Beacon Press, 1984), hlm. 99.
- 3 Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (MIT Press, 1991).
- 4 Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Volume 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason* (Beacon Press, 1987).
- 5 Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power* (PublicAffairs, 2019).
- 6 Eli Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You* (Penguin Press, 2011).
- 7 MAFINDO, *Laporan Pemantauan Hoaks dan Misdisinformasi Pemilu 2024* (Jakarta: MAFINDO, 2024).
- 8 Mietzner, M., "Rival Populisms and the Democratic Crisis in Indonesia: Chauvinists, Islamists and Technocrats", *Australian Journal of International Affairs*, 74(4) (2020).
- 9 Nugroho, Y. & Syarif, S., *Digital Fragmentation and Public Health: Mapping COVID-19 Narratives in Indonesia* (Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, 2022).
- 10 Jürgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action* (MIT Press, 1990), hlm. 66.
- 11 Michel Foucault, *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction* (Pantheon Books, 1978).
- 12 Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge* (Pantheon Books, 1972).
- 13 Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (Vintage Books, 1995).
- 14 Michel Foucault, "Society Must Be Defended": *Lectures at the Collège de France, 1975-76* (Picador, 2003).
- 15 Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (Vintage Books, 1995), hlm. 200-209.
- 16 Tarleton Gillespie, "The Relevance of Algorithms", dalam *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society*, diedit oleh Tarleton Gillespie dkk. (MIT Press, 2014).
- 17 Antoinette Rouvroy dan Thomas Berns, "Algorithmic Governmentality and Prospects of Emancipation", *Réseaux*, 177(1) (2013).
- 18 Human Rights Watch, *Indonesia: New Criminal Code Disastrous for Rights* (2020), diakses dari hrw.org.
- 19 Nurul Afifah, "Biopolitical Surveillance in Pandemic: A Foucaultian Reading of PeduliLindungi App", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1) (2021).
- 20 Michel Foucault, *Ethics: Subjectivity and Truth (The Essential Works of Michel Foucault, 1954-1984, Vol. 1)* (New Press, 1997).
- 21 Max Scheler, *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values: A New Attempt Toward the Foundation of an Ethical Personalism* (Northwestern University Press, 1973).
- 22 Max Scheler, *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values*, hlm. 104-110.
- 23 Max Scheler, *Ressentiment* (Marquette University Press, 1994).
- 24 Eve Warburton, "Polarization and Democratic Decline in Indonesia", dalam *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, diedit oleh Thomas Power dan Eve Warburton (ISEAS Publishing, 2020).
- 25 Max Scheler, *The Nature of Sympathy* (Routledge & Kegan Paul, 1973).

DAFTAR PUSTAKA

- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1987). *The Theory of Communicative Action, Volume 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1990). *Moral Consciousness and Communicative Action*. MIT Press.
- Habermas, J. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.
- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*. Penguin Press.
- MAFINDO. (2024). *Laporan Pemantauan Hoaks dan Misdisinformasi Pemilu 2024*. Jakarta: MAFINDO.
- Mietzner, M. (2020). “Rival Populisms and the Democratic Crisis in Indonesia: Chauvinists, Islamists and Technocrats”. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4).
- Nugroho, Y. & Syarief, S. (2022). *Digital Fragmentation and Public Health: Mapping COVID-19 Narratives in Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality, Volume 1: An Introduction*. Pantheon Books.
- Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- Foucault, M. (1997). *Ethics: Subjectivity and Truth (The Essential Works of Michel Foucault, 1954-1984, Vol. 1)*. New Press.
- Foucault, M. (2003). “Society Must Be Defended”: *Lectures at the Collège de France, 1975-76*. Picador.

- Gillespie, T. (2014). "The Relevance of Algorithms". In *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society*, ed. Tarleton Gillespie et al. MIT Press.
- Rouvroy, A., & Berns, T. (2013). "Algorithmic Governmentality and Prospects of Emancipation". *Réseaux*, 177(1).
- Human Rights Watch. (2020). *Indonesia: New Criminal Code Disastrous for Rights*. Retrieved from hrw.org.
- Afifah, N. (2021). *Biopolitical Surveillance in Pandemic: A Foucaultian Reading of PeduliLindungi App*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1).
- Scheler, M. (1973). *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values: A New Attempt Toward the Foundation of an Ethical Personalism*. Northwestern University Press.
- Scheler, M. (1973). *The Nature of Sympathy*. Routledge & Kegan Paul.
- Scheler, M. (1994). *Ressentiment*. Marquette University Press.
- Warburton, E. (2020). "Polarization and Democratic Decline in Indonesia". In *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?*, ed. Thomas Power and Eve Warburton. ISEAS Publishing.